



**PEMERINTAH
KABUPATEN BATU BARA**



**DISKOMINFO
KABUPATEN BATU BARA**

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat, serta hidayahNya sehingga dokumen Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 berhasil diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan kewajiban bagi setiap perangkat daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 guna mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara dalam penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika, statistik sectoral dan persandian berdasarkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Infomatika 2019-2023.

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara atas penggunaan APBD Kabupaten Batu Bara Tahun 2023. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan.

Saat ini perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu kebutuhan dan keharusan yang tidak bisa dihindarkan untuk dilaksanakan, dalam kondisi masyarakat Kabupaten Batu Bara yang kritis dan dinamis, setiap perangkat daerah harus bisa menjaga kepercayaan publik melalui kinerja yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan pencapaian sesuai target yang direncanakan. Laporan Kinerja Tahun 2023 ini merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023.

Akhirnya Laporan Kinerja ini telah diupayakan sebaik mungkin dalam penyajiannya namun demikian kami menyadari masih dijumpai tantangan dan masalah dalam pencapaian target kinerja, dan hal tersebut akan senantiasa diupayakan lebih baik lagi pencapaiannya di tahun-tahun mendatang. Diharapkan Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Air Putih, Januari 2024

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BATU BATA

EDWIN A. SITORUS, S.Sos., SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196907261993031005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Struktur Organisasi.....	2
1.2 Tugas dan Fungsi.....	3
1.3 Isu-isu Strategis	4
BAB II	6
PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	6
2.1 Perencanaan Kinerja.....	6
2.2 Perjanjian Kinerja.....	9
BAB III	11
AKUNTABILITAS KINERJA	11
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	11
3.2 Realisasi Anggaran	13
BAB IV.....	16
PENUTUP	16
LAMPIRAN	18

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Tabel 2.2 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 – 2023

Tabel 3.5 Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 Per Sasaran Kegiatan

Tabel 3.6 Realisasi Anggaran Per Program Kegiatan Pendukung Sasaran

Tabel 3.7 Analisis Efisiensi Anggaran Dalam Rangka Pencapaian Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Batu Bara

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi.

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 ini merupakan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan komunikasi dan informatika, statistic sectoral dan urusan bidang persandian di Kabupaten Batu Bara serta kewenangan dalam pengelolaan sumber daya berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara,
2. Mendorong Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara untuk meningkatkan kinerjanya,

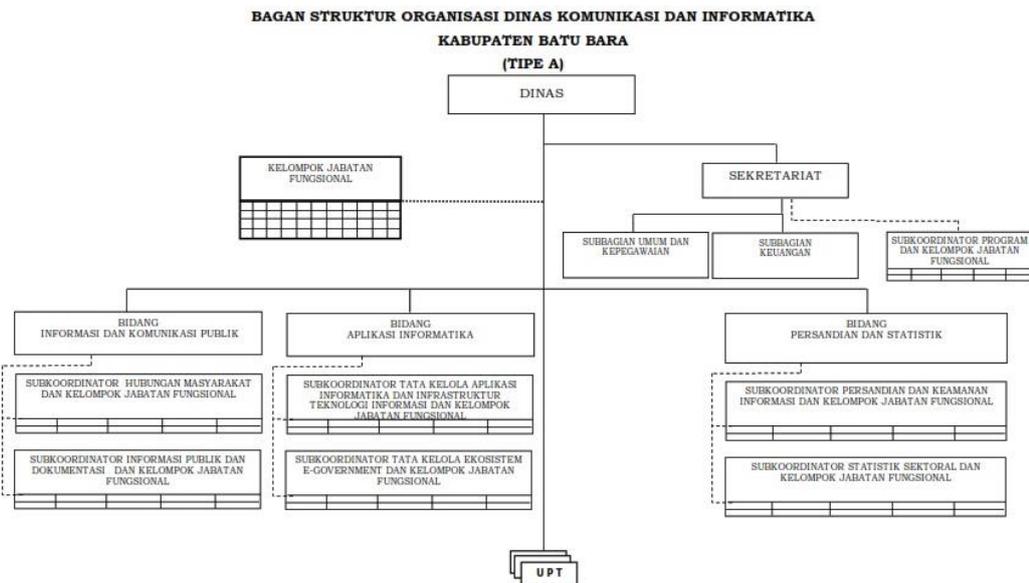
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1 Struktur Organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara. Dan untuk pelaksanaannya kemudian diatur dalam Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara dan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 54 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Komunikasi dan Informatika. Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

- a. Kepala Dinas,
- b. Sekretariat,
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik,
- d. Bidang Aplikasi Informatika,
- e. Bidang Persandian dan Statistik,
- f. Unit Pelaksana Teknis,
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1.1: Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara (Sesuai Perbup Batu Bara No. 54 Tahun 2022)

1.2 Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 54 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Batu Bara, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Komunikasi dan Informatika, bidang statistik dan bidang persandian. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati dibidang komunikasi dan informatika berdasarkan tugas pokok dan fungsi dinas komunikasi dan informatika, serta visi dan arah pembangunan daerah;
2. Perumusan kebijakan dibidang informasi dan komunikasi publik, bidang aplikasi informatika, bidang persandian dan statistik di lingkup dinas komunikasi dan informatika untuk mendukung pemerintahan daerah;
3. Penyampaian laporan hasil kinerja dan sasaran kinerja serta saran atau pendapat kepada bupati/wakil bupati dan sekretaris daerah menyangkut urusan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
4. Koordinasi pelaksanaan tugas, penyiapan bahan pembinaan, layanan manajemen data dan informasi e-government dan layanan sistem

- komunikasi intra pemerintah daerah kabupaten, dan pengembangan sumber daya TIK (Teknologi Informasi Komunikasi) Pemerintah Daerah;
5. Analisis penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penyiapan program penyediaan akses informasi, layanan manajemen data dan informasi e-goverment dan integrasi layanan publik dan pemerintahan;
 6. Koordinasi kegiatan pelaksanaan tugas, penyiapan bahan pembinaan teknis dan manajemen layanan hubungan media, penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, layanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet;
 7. perumusan tata kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan di lingkungan pemerintah daerah, perumusan peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi;
 8. pengelolaan perangkat lunak persandian dan perangkat keras persandian dan jaringan komunikasi sandi;
 9. Validasi kompilasi produk administrasi di bidang sosial, ekonomi, politik, hukum, HAM serta mendiseminasikan data statistik sektoral dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara;
 10. Pembinaan dan Pelaksanaan kerja sama dalam bidang komunikasi dan informatika dengan instansi pemerintah serta pihak-pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijaksanaan pemerintah;

1.3 Isu-isu Strategis

Permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi urusan bidang komunikasi dan informatika, urusan bidang statistik dan urusan bidang persandian diantaranya:

1. Terbatasnya sumber daya manusia yang terampil dan professional di bidang teknologi dan informasi;
2. Kurangnya pengintegrasian sistem informasi dan database OPD;
3. Kurangnya pemberdayaan potensi komunikasi masyarakat;
4. Masih belum optimalnya penggunaan *e-government* untuk Pelayanan masyarakat yang dikelola oleh OPD;

5. Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK serta belum terintegrasi atau masih terpecah di masing–masing OPD yang melakukan fungsi pelayanan publik.

Dengan permasalahan yang diidentifikasi tersebut menjadi hambatan dan kelemahan Dinas Komunikasi dan Informatika yang berdampak terhadap pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika. Identifikasi permasalahan pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Terbatasnya sumber daya manusia yang terampil dan professional di bidang teknologi dan informasi	Masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM yang memadai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya kuantitas SDM, yang sesuai standar kebutuhan unit kerja; 2. Masih adanya penempatan SDM yang belum sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi pendidikan dan keahlian.
2	Kurangnya pengintegrasian sistem informasi dan database OPD	Belum Tersedianya Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pusat data (<i>data center</i>); 2. Belum optimalnya penerapan kompetensi sumber daya manusia bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.
3	Kurangnya pemberdayaan potensi komunikasi masyarakat	Kurangnya wahana dan sarana informasi kepada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman dan kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo; 2. Belum maksimalnya sosialisasi manfaat pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).
4	Masih belum optimalnya penggunaan <i>e-government</i> untuk Pelayanan masyarakat yang di kelola oleh OPD	Masih rendahnya program dan kegiatan yang mengarah pada pengembangan aplikasi pelayanan OPD.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya SDM yang paham dalam penggunaan aplikasi <i>e-government</i>. 2. Belum optimalnya server dalam pengembangan aplkasi pelayanan.
5	Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK serta belum terintegrasi atau masih terpecah di masing–masing OPD yang melakukan fungsi pelayanan publik	Kesadaran aparatur dalam pengembangan aplikasi TIK yang terintegrasi masih rendah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih adanya ego sektoral masing-masing OPD; 2. Peningkatan pengembangan SDM dan server dalam pengembangan aplkasi pelayanan masih minim.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Kinerja

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019-2023 yang mengacu dari visi dan misi Pembangunan Kabupaten Batu Bara, berisikan cara pencapaian tujuan yang memuat strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara dalam mencapai perencanaan strategi pembangunan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Batu Bara.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Batu Bara untuk jangka waktu 2019-2023 yaitu “ Menjadikan Masyarakat Kabupaten Batu Bara Masyarakat Industri Yang Sejahtera, Mandiri, Dan Berbudaya ”, dirumuskan 8 (delapan) misi yang kemudian diterjemahkan ke dalam agenda pembangunan RPJMD Kabupaten Batu Bara Tahun 2019-2023 yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan aparatur pemerintah atas pelayanan publik dan investasi;
2. Meningkatkan jumlah dan kualitas infrastruktur dan sarana prasarana pendukung pertumbuhan industri dan perekonomian masyarakat;
3. Mewujudkan masyarakat yang produktif, inovatif, dan berbudaya;
4. Mewujudkan industri berbasis sumber daya unggulan Kabupaten Batu Bara;
5. Meningkatkan pemasaran hasil industri, pertanian dan perikanan secara meluas memanfaatkan teknologi berkembang;
6. Meningkatkan kolaborasi industri, lembaga pendidikan, dan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
7. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan spiritual masyarakat;
8. Meningkatkan peran serta seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Batu Bara.

Dari delapan misi pembangunan Kabupaten Batu Bara tersebut, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika memfokuskan kepada misi prioritas. Misi tersebut adalah:

MISI 1: Meningkatkan Pelayanan Aparatur Pemerintah Atas Pelayanan Publik dan Investasi

Dalam rangka meningkatkan pelayanan aparatur pemerintah atas pelayanan publik dan investasi dalam RPJMD Tahun 2019-2023 disusun dengan prioritas membentuk aparatur pemerintah yang profesional dan melayani dengan hati. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sasaran yang ingin diwujudkan adalah :

1. Sasaran-1 : Terwujudnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Terwujudnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ditandai dengan meningkatnya predikat Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Batu Bara melalui peningkatan persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan Informasi Teknologi (IT) dengan baik dan meningkatnya persentase pengamanan website dan aplikasi daerah melalui pengembangan sistem aplikasi tata kelola pemerintahan berbasis *e-government* untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern dan meningkatnya implementasi *open government* pada seluruh instansi pemerintah, dan meningkatnya akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah daerah.

Strategi yang ditempuh antara lain :

1. Menciptakan Tata Kelola Profesional melalui pemenuhan kebutuhan dasar administrasi perkantoran.
2. Menyiapkan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Telekomunikasi dengan Pengembangan sistem *e-government* untuk meningkatkan Pelayanan Publik bagi masyarakat;
3. Menyiapkan sistem pengamanan data bagi sistem *e-government* bagi seluruh perangkat daerah termasuk layanan persandian dan komunikasi.

Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan operasional administrasi perkantoran yang efektif dan efisien;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur;

3. Meningkatkan kualitas SDM aparatur;
4. Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah;
5. Menyiapkan layanan *e-government* yang terintegrasi yang memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat;
6. Pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
7. Pengembangan SDM bidang sains dan telekomunikasi.

2. Sasaran-2 : Terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

Terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik ditandai dengan meningkatnya peringkat penilaian penghargaan anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) melalui pelayanan informasi publik, publikasi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah pada Media Komunikasi Publik berupa media cetak, media daring, media sosial, radio dan televisi, serta media luar ruang, dan komunikasi tatap muka. strategi yang ditempuh, yaitu :

1. Meningkatkan kerjasama informasi dengan media cetak dan elektronik;
2. Menyediakan publikasi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah pada Media Komunikasi Publik (media cetak, media daring, media sosial, radio dan televisi, serta media luar ruang, dan komunikasi tatap muka).
3. Menyiapkan data yang dibutuhkan daerah dengan menyelenggarakan statistik sektoral dengan bekerjasama dengan instansi terkait termasuk dengan Badan Pusat Statistik (BPS).
4. Penyediaan layanan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Arah kebijakan :

1. Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik yang dikelola OPD.
2. Pengelolaan media komunikasi publik melalui kerjasama informasi dengan media massa.
3. Pelayanan Informasi Publik melalui PPID;

4. Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas;
 5. Pengembangkan data dan informasi statistik sektoral.
3. Sasaran-3 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ditandai dengan meningkatnya nilai akhir dari penjumlahan komponen akuntabilitas kinerja (AKIP) Perangkat Daerah. Strategi yang ditempuh antara lain :
1. Menyusun dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
 2. Menyusun dokumen laporan kinerja dan keuangan Perangkat Daerah.

Arah Kebijakan :

1. Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Penyusunan dokumen RKA-SKPD;
3. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah.

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Terwujudnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Predikat Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai Indeks (Predikat)	2,61 (Baik)
2	Terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik	Peringkat Penilaian Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Peringkat (Penilaian)	90 (Informatif)
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai (Peringkat)	71 (BB)

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.179.516.782	APBD
2	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	1.739.274.750	APBD
3	Program Aplikasi Informatika	822.976.984	APBD
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	182.715.000	APBD
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	217.486.200	APBD
JUMLAH		7.141.969.716	

Pada tahun 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara melaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Dalam perubahan Perjanjian Kinerja ini tidak merubah sasaran strategis dan indikator kinerja namun merubah besarnya jumlah Anggaran yang diperlukan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan yang dilakukan, Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Terwujudnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Predikat Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai Indeks (Predikat)	2,61 (Baik)
2	Terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik	Peringkat Penilaian Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Peringkat (Penilaian)	90 (Informatif)
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai (Peringkat)	71 (BB)

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.725.226.191	P-APBD
2	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	2.429.499.750	P-APBD
3	Program Aplikasi Informatika	717.726.984	P-APBD
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	178.957.500	P-APBD
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	85.011.200	P-APBD
JUMLAH		8.136.421.625	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 ≤ 100	Sangat Baik
2	76 ≤ 90	Tinggi
3	66 ≤ 75	Sedang
4	51 ≤ 65	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Predikat Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,61 (Baik)	2,34 (Cukup)	89,66 %
2	Terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik	Peringkat Penilaian Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	90 (Informatif)	91 (Informatif)	101,11 %
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	71 (B)	70.91 (BB)	99,87 %

Berdasarkan tabel di atas capaian sasaran I (Pertama) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 sebesar 89,66% yang artinya

capaian kinerja termasuk dalam kategori tinggi. Adapun penyebab capaian kinerja masih belum sesuai target karena pada Domain Tata Kelola SPBE dimana Aspek Perencanaan Strategis SPBE berupa Dokumen Arsitektur SPBE, Dokuemn Peta Rencana SPBE dan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE belum ada dan belum terdokumentasi secara formal, hal ini dibutuhkan untuk mendukung salah satu syarat indikator yang diperlukan dalam penilaian dan evaluasi SPBE. Selain itu dari sisi Domain Manajemen SPBE dengan Aspek Penerapan Manajemen SPBE dan Aspek Audit TIK juga masih belum menunjang Indeks SPBE.

Capaian sasaran II (Kedua) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara sebesar 101,11%, artinya pada tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara mendapat penilaian yang melebihi target yang telah ditetapkan dengan kategori sangat tinggi.

Berdasarkan tabel diatas capaian sasaran III (Ketiga) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 adalah tercapai dan secara persentase mencapai 99,87% dengan kategori sangat tinggi.

Secara umum, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Capaian sasaran diukur dari tercapainya kondisi yang ingin diwujudkan pada tingkat *outcome*. Ukuran pada tingkat *outcome* telah dapat dilakukan, meski masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut.

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Periode Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2023	Capaian
1	Terwujudnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Predikat Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,61 (Baik)	2,34 (Cukup)	89,66 %
2	Terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik	Peringkat Penilaian Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	90 (Informatif)	91 (Informatif)	101,11 %
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	71 (B)	70.91 (BB)	99,87 %

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 – 2023

No.	Indikator Kinerja Utama	2019	2020	2021	2022	2023
1	Predikat Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	0	2,09	1,96	2,18	2,34
2	Peringkat Penilaian Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	0	0	0	91	91
3	Nilai AKIP Perangkat Daerah	0	67,95	71,07	74	70,91

Perbandingan realisasi kinerja Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 terus mengalami kenaikan, walaupun pada kenyataannya realisasi tahun ini terhadap target periode akhir Renstra masih tercapai 89,66%. Peningkatan Penilaian Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) juga terus mendapatkan penilaian kategori Informatif yang merupakan kategori tertinggi, memang pada masa pandemi Covid-19 lalu Komisi Informasi Sumatera Utara tidak melakukan monitoring dan evaluasi sehingga tidak terdapat penilaian KIP di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Kinerja terkait AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara dari tahun ke tahun terus mengalami perbaikan, evaluasi perbaikan Nilai AKIP akan terus menjadi perhatian utama Dinas Komunikasi dan Informatika di tahun berikutnya terkhusus pada aspek publikasi pelaporan kinerja di setiap tahunnya.

Pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 pada umumnya menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik. Terhadap capaian indikator kinerja yang belum tercapai secara maksimal, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara akan tetap melakukan langkah konstruktif dan konkrit melalui analisis dan evaluasi agar kinerja yang telah dicapai semakin ditingkatkan di masa mendatang.

3.2 Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023 sebesar 96,04% dari total anggaran yang dialokasikan. Dari total belanja operasi Rp.8.067.958.625,00,- terserap sebesar Rp.7.746.064.577,00,- dan belanja modal sebesar Rp. 68.463.000,00,- terserap sebesar Rp. 68.300.000,00,-.

Realisasi anggaran untuk program utama yaitu Program Informasi dan Komunikasi Publik 98,28%; Program Aplikasi Informatika sebesar 85,34%;

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral sebesar 87,27% dan Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi sebesar 96,30%. Sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar 96,85%.

Tabel 3.5 Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 Per Sasaran Kegiatan

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	Terwujudnya Tatan Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Predikat Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,61 (Baik)	2,34 (Cukup)	89,66 %	802.738.184	694.358.237	86,50%
2	Terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik	Peringkat Penilaian Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	90 (Informatif)	91 (Informatif)	101,11 %	2.608.457.250	2.543.781.938	97,52%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	71 (BB)	70,91 (BB)	99,87 %	4.725.226.191	4.576.224.402	96,85%

Tabel 3.6 Realisasi Anggaran Per Program Kegiatan Pendukung Sasaran

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Program	Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	Terwujudnya Tatan Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Predikat Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,61 (Baik)	2,34 (Cukup)	89,66%	Program Aplikasi Informatika	717.726.984	612.495.130	85,34%
						Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	85.011.200	81.863.107	96,30%
2	Terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik	Peringkat Penilaian Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	90 (Informatif)	91 (Informatif)	101,11 %	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	2.429.499.750	2.387.607.060	98,28%
						Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	178.957.500	156.174.878	87,27%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	71 (B)	70,91 (BB)	99,87%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.725.226.191	4.576.224.402	96,85%
TOTAL							8.136.421.625	7.814.364.577	96,04%

Dari lima program yang dilaksanakan, tiga program mencapai realisasi diatas 90%, dua program hanya mencapai realisasi diatas 80% yaitu Program Aplikasi Informatika dan Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral. Realisasi anggaran yang masuk kategori tinggi ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan apa yang direncanakan.

Dalam pelaksanaan kegiatan, diharapkan anggaran dapat tercapai semaksimal mungkin, sehingga telah ditindaklanjuti dalam perencanaan tahun 2024 dengan melakukan perhitungan yang lebih cermat dalam penentuan kebutuhan anggaran.

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2023 telah mencukupi dan digunakan dengan efisien.

Analisis efisiensi anggaran dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabuapten Batu Bara disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Analisis Efisiensi Anggaran Dalam Rangka Pencapaian Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Terwujudnya Tatan Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Predikat Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	89,66 %	86,50%	3,16%
2	Terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik	Peringkat Penilaian Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	101,1 %	97,52%	3,58%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	99,87 %	96,85%	3,02%

Dari tabel tersebut diketahui bahwa Sasaran Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika telah mencapai kinerja sebesar 100% di satu sasaran dan dua sasaran yang dibawah 100%, serta dikatakan EFISIEN dengan efisiensi anggaran sebesar 3,16% pada sasaran Terwujudnya Tatan Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), 3,58% pada sasaran Terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik dan 3,02% pada sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh pemantapan koordinasi baik internal Dinas Komunikasi dan Informatika maupun dengan perangkat daerah terkait.

BAB IV

PENUTUP

Penyelenggaraan Program dan Kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara pada Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun ke lima atau Periode Akhir dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara Tahun 2019-2023. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh semua pihak.

Hasil laporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa analisis sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika “Terwujudnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)” dengan indikator kinerja “Predikat Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)”, “Terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik” dengan indikator kinerja “Peringkat Penilaian Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP)”, dan “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” dengan indikator kinerja “Nilai AKIP Perangkat Daerah” diperoleh capaian kinerja sebesar 96,88%. Keberhasilan pencapaian tersebut didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Komitmen Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam penyediaan anggaran melalui APBD Kabupaten Batu Bara 2023 guna meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan masyarakat,
2. Penyediaan sumber daya manusia yang kompeten,
3. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai,
4. Hubungan yang baik dengan media baik media cetak maupun media elektronik,
5. Kerjasama yang baik dengan pihak swasta.

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja yang baik tersebut dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

1. Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai media untuk diseminasi program Pemerintah Kabupaten Batu Bara,

2. Peningkatan koordinasi dengan seluruh perangkat daerah dalam penanganan aduan, usul saran, pertanyaan masyarakat yang disampaikan melalui aplikasi PPID,
3. Peningkatan kerjasama dengan pakar ahli dan perguruan tinggi dan swasta,
4. Peningkatan kelengkapan dokumen pendukung Domain SPBE Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
5. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan perangkat daerah dalam pengembangan aplikasi layanan publik,
6. Peningkatan pengamanan informasi melalui jaring komunikasi sandi, sosialisasi penggunaan internet sehat dan pengawasan serta pengendalian komunikasi dan informatika.

Laporan Kinerja bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara mempunyai makna strategis, sebagai bagian dari perwujudan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik sektoral. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, secara umum dapat dilihat bahwa kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023 adalah baik. Perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien tercermin dari hasil pengukuran kinerja kegiatan belanja operasional maupun belanja modal yang pada tahun 2023 anggaran terserap 96,04 %.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara ini kami susun semoga bisa menjadi bahan evaluasi bersama demi peningkatan Kinerja Organisasi serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Batu Bara.

LAMPIRAN

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BATU BARA



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **EDWIN A. SITORUS, S.Sos, SE, M.Si**
Jabatan : **KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BATU BARA**

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. H. ZAHIR, MAP**
Jabatan : **BUPATI BATU BARA**

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lima Puluh, 9 Oktober 2023

Pihak Kedua,
BUPATI BATU BARA

Ir. H. ZAHIR, MAP

Pihak Pertama,
**KEPALA DINAS KOMINFO
KABUPATEN BATU BARA**

EDWIN A. SITORUS, S.Sos, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196907261993031005

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BATU BARA**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Predikat Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	2,61 (Baik)
2	Terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Peringkat Penilaian Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Nilai	Informatif
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	BB (71,00)

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.725.226.191	PAPBD
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	2.429.499.750	PAPBD
3	Program Aplikasi Informatika	717.726.984	PAPBD
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	178.957.500	PAPBD
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	85.011.200	PAPBD
JUMLAH		8.136.421.625	

Lima Puluh, 9 Oktober 2023

Pihak Kedua,
BUPATI BATU BARA

H. H. ZAHIR, MAP

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS KOMINFO
KABUPATEN BATU BARA

EDWIN A. SITORUS, S.Sos, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196907261993031005



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR **13** TAHUN 2024
TENTANG
HASIL EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA
INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada instansi pusat dan pemerintah daerah, telah dilakukan kegiatan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas, telah diperoleh nilai indeks dan predikat sistem pemerintahan berbasis elektronik pada instansi pusat dan pemerintah daerah tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023;

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
8	Pemerintah Kab. Aceh Tengah	1,88	Cukup
9	Pemerintah Kab. Aceh Tenggara	1,74	Kurang
10	Pemerintah Kab. Simeulue	1,86	Cukup
11	Pemerintah Kab. Bireuen	2,12	Cukup
12	Pemerintah Kab. Aceh Singkil	1,95	Cukup
13	Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya	2,61	Baik
14	Pemerintah Kab. Gayo Lues	2,47	Cukup
15	Pemerintah Kab. Aceh Tamiang	2,81	Baik
16	Pemerintah Kab. Nagan Raya	2,62	Baik
17	Pemerintah Kab. Aceh Jaya	2,42	Cukup
18	Pemerintah Kab. Bener Meriah	2,61	Baik
19	Pemerintah Kab. Pidie Jaya	2,63	Baik
20	Pemerintah Kota Sabang	2,44	Cukup
21	Pemerintah Kota Banda Aceh	3,54	Sangat Baik
22	Pemerintah Kota Langsa	1,84	Cukup
23	Pemerintah Kota Lhokseumawe	2,35	Cukup
24	Pemerintah Kota Subulussalam	2,11	Cukup

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sumatera Utara

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	3,21	Baik
2	Pemerintah Kab. Deli Serdang	3,47	Baik
3	Pemerintah Kab. Karo	2,57	Cukup
4	Pemerintah Kab. Langkat	3,03	Baik
5	Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah	1,87	Cukup
6	Pemerintah Kab. Simalungun	2,32	Cukup
7	Pemerintah Kab. Labuhanbatu	2,94	Baik
8	Pemerintah Kab. Dairi	2,67	Baik
9	Pemerintah Kab. Tapanuli Utara	2,69	Baik
10	Pemerintah Kab. Tapanuli Selatan	2,69	Baik
11	Pemerintah Kab. Asahan	1,97	Cukup
12	Pemerintah Kab. Nias	2,62	Baik
13	Pemerintah Kab. Toba	2,16	Cukup
14	Pemerintah Kab. Mandailing Natal	2,83	Baik
15	Pemerintah Kab. Nias Selatan	1,81	Cukup
16	Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan	2,30	Cukup
17	Pemerintah Kab. Pakpak Bharat	2,41	Cukup
18	Pemerintah Kab. Samosir	2,69	Baik
19	Pemerintah Kab. Serdang Bedagai	2,59	Cukup
20	Pemerintah Kab. Padang Lawas	2,02	Cukup
21	Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara	1,98	Cukup
22	Pemerintah Kab. Batubara	2,34	Cukup